

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pada Hakekatnya tujuan pembangunan suatu Negara adalah untuk mensejahterahkan masyarakat, begitu juga halnya dengan Negara Indonesia. Dalam pembangunan Undang-undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa tujuan Pembangunan Nasional Bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dalam merealisasikan tujuan pembangunan, maka segenap potensi alam harus digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Begitu pula dengan Potensi manusia berupa penduduk yang banyak jumlahnya harus ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya sehingga mampu menggali, mengembangkan dan memanfaatkan potensi alam secara maksimal, dan pelaksanaan program pembangunan tercapai. Berhasilnya tujuan pembangunan desa dalam rangka mendukung tercapainya cita-cita bangsa, selain tergantung pada peran aktif masyarakat, sikap, mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara pemerintahan itu sendiri, juga sangat ditentukan oleh berfungsinya pengawasan dalam proses pelaksanaan pembangunan desa. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat desa sangat perlu diperhatikan oleh pemerintah. Tugas pemerintah dalam mengupayakan peningkatan kesejahteraan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat desa harus diiringi jaminan

keamanan, ketertiban, dan kenyamanan yang menjadi prasyarat pembangunan desa. Maka masyarakat desa perlu diikutsertakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam pembangunan desa tersebut. Kaitanya dengan pembangunan desa peran partisipasi masyarakat sangat penting dalam pembangunan desa mengingat masyarakat setempatlah yang lebih mengetahui berbagai permasalahan dan potensi sumberdaya yang ada sehingga memudahkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, dengan adanya peran partisipasi masyarakat maka hasil dari pembangunan yang dilakukan nantinya diharapkan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dari masyarakat sehingga tidak menimbulkan ketidaknyamanan ataupun konflik dalam masyarakat desa tersebut. Sehubungan dengan itu, maka semua aparat pemerintah desa perlu menyadari pentingnya fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan desa tersebut. Mengenai peranan serta fungsi pemerintah dalam pembangunan nasional di Indonesia, landasannya sudah terdapat dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi sebagai; Membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pembangunan desa adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh, serta masyarakat desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup yang layak. Karakteristik pembangunan desa

memiliki sifat yang multi dimensional mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat di desa dioperasionalkan melalui berbagai sektor dan program yang saling berkaitan dari pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat dengan bantuan dan bimbingan dari pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan adalah suatu fenomena pemerintahan. Dalam mewujudkan tujuan pembangunan desa dibutuhkan kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat. Selain itu juga diperlukan kebijakan pemerintah untuk mengarahkan serta membimbing masyarakat guna bersama-sama melaksanakan program pembangunan desa.

Kemampuan kepala desa juga sangat diperlukan untuk mempengaruhi masyarakat agar mereka lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam pembangunan serta masyarakat dapat memberikan saran yang positif demi kelangsungan pembangunan desa. Dalam pemerintah desa administrator dalam pembangunan yaitu Kepala desa yang dibantu urusan pembanguan. Kepala desa mempunyai kewibawaan tertentu dan kewenangan-kewenangan untuk melaksanakan kegiatan dengan menggunakan keahlian profesinya serta berbagai teknik manajemen untuk mendapatkan yang ingin dicapai dalam memimpin desa. Oleh sebab itu diperlukan seorang pemimpin desa yang mempunyai wawasan yang luas, mampu menghadapi tantangan, mempunyai keahlian, bertanggung jawab agar dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagai kepala desa dapat berjalan dengan baik Untuk itu aparat pemerintahan desa perlu perlu menyusun program menurut fungsi dan kemampuan masing-masing guna mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pada saat otonomi daerah ini, pemerintah menjadikan masyarakat sebagai obyek dan sekaligus sebagai subyek pembangunan yang memungkinkan tercapainya pembangunan secara optimal. Pembangunan tidak hanya berfokus pada perkotaan, namun juga di pedesaan, karena sebagian besar penduduk berada di pedesaan. Atas dasar pertimbangan itulah sehingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan senantiasa diupayakan untuk ditumbuhkan dan dikembangkan mulai dari masyarakat kelurahan/desa sampai pada masyarakat kota. Bagi bangsa Indonesia yang sebagian besar penduduknya bertempat tinggal di daerah pedesaan, pemerataan hasil pembangunan merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan. Penyelenggaraan proses pembangunan sejak dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dilakukan secara partisipasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Berhasilnya tujuan pembangunan desa dalam rangka mendukung tercapainya cita-cita bangsa, selain tergantung pada peran aktif masyarakat, sikap, mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara pemerintahan itu sendiri, juga sangat ditentukan oleh berfungsinya pengawasan dalam proses pelaksanaan pembanguann desa. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat desa sangat perlu diperhatikan oleh pemerintah. Tugas pemerintah dalam mengupayakan peningkatan kesejahteraan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat desa harus diiringi jaminan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan yang menjadi prasyarat pembangunan desa. Maka masyarakat desa perlu diikutsertakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam pembangunan desa tersebut. Kaitanya dengan pembangunan desa peran partisipasi

masyarakat sangat penting dalam pembangunan desa mengingat masyarakat setempatlah yang lebih mengetahui berbagai permasalahan dan potensi sumberdaya yang ada sehingga memudahkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, dengan adanya peran partisipasi masyarakat maka hasil dari pembangunan yang dilakukan nantinya diharapkan dapat sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dari masyarakat sehingga tidak menimbulkan ketidaknyamanan ataupun konflik dalam masyarakat desa tersebut.

Pembangunan partisipatif harus dimulai dengan masyarakat sebagai manusia yang memiliki aspirasi dan paling mengetahui tentang kebutuhannya. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah daerah harus dapat memposisikan diri sebagai fasilitator untuk menciptakan suasana yang menunjang kegiatan masyarakat yang diharapkan dapat mendukung keberhasilan pembangunan desa. Pembangunan di wilayah pedesaan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan yang semakin memantapkan ketahanan masyarakat dalam upaya meletakkan dasar dan landasan ekonomi, sosial, budaya, politik, keamanan dan ketahanan nasional. Untuk itu, pembangunan pedesaan diarahkan kepada kegiatan pengembangan secara terpadu dan menyeluruh dengan cara memperdayakan setiap komponen di masyarakat dalam rangka meningkatkan pengembangan masing-masing desa. Dalam mewujudkan tujuan pembangunan desa dibutuhkan kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat. Selain itu juga diperlukan kebijakan pemerintah untuk mengarahkan serta membimbing masyarakat guna bersama-sama melaksanakan program pembangunan desa.

Pembangunan melalui partisipasi masyarakat merupakan salah satu upaya untuk memberdayakan potensi masyarakat dalam merencanakan pembangunan yang berkaitan dengan potensi sumber daya lokal berdasarkan kajian musyawarah. Musyawarah dilakukan dalam rangka peningkatan aspirasi berupa keinginan dan kebutuhan nyata yang ada dalam masyarakat, peningkatan motivasi dan peran serta kelompok masyarakat dalam proses pembangunan, dan peningkatan rasa memiliki pada kelompok masyarakat terhadap program pembangunan yang telah disusun. Secara sederhana, konsep partisipasi terkait dengan "keterlibatan suatu pihak dalam kegiatan yang dilakukan oleh pihak lain". Partisipasi merupakan sebuah proses dimana masyarakat sebagai stakeholders, terlibat mempengaruhi dan mengendalikan pembangunan di tempat mereka masing-masing. Masyarakat turut serta secara aktif dalam memprakarsai kehidupan mereka, melalui proses pembuatan keputusan dan perolehan sumberdaya dan penggunaannya. Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan akan terwujud sebagai suatu kegiatan nyata dalam setiap jenis kegiatan apabila pada diri masyarakat ada kemauan, kesediaan, kemampuan, upaya, dan kesempatan atau peluang. Partisipasi sesungguhnya merupakan sikap keterbukaan terhadap persepsi dan prasana pihak lain, juga merupakan suatu perhatian mendalam mengenai perubahan yang akan dihasilkan oleh suatu kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan masyarakat. Partisipasi juga merupakan kesadaran mengenai kontribusi yang diberikan oleh pihak lain untuk suatu kegiatan dalam memajukan desa.

Namun dapat kita lihat saat ini bahwa masih banyak diberbagai desa yang dimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa sangat kurang sehingga pembangunan yang sudah direncanakan tidak dapat berjalan dengan baik dikarenakan tidak adanya partisipasi masyarakat yang mendukung pemerintah setempat dalam pembangunan desa untuk mengoptimalkan kesejahteraan bersama sehingga sasaran pembangunan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini memberi arti bahwa masyarakat harus benar berperan aktif dalam pembangunan desa tersebut dan pemerintah berkewajiban memberikan pengarahan terhadap masyarakat.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, penulis akan melakukan penelitian untuk mengetahui tentang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa. Untuk itu penulis menetapkan judul **“Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Untuk Mengoptimalkan Kesejahteraan Masyarakat” (Studi Pada Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang)”**.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas,dapat dirumuskan fokus permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa di Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang?
2. Apa saja faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang?

1.3. Tujuan Penulisan

- a) Mengetahui gambaran mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.
- b) Mengetahui faktor penghambat dalam pembangunan desa di Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.

1.4. Manfaat Penelitian

- a) Manfaat terhadap akademik

Sebagai bahan studi perbandingan bagi peneliti selanjutnya mengenai bagaimana partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat di desa di Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang sebagai salah satu kontribusi pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang menyangkut partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Bandar klippa.

- b) Manfaat bagi pemerintah di Desa Bandar Klippa

Secara praktis, hasil dari penelitian yang akan dilakukan ini yaitu dapat menjadi suatu bahan masukan bagi Pemerintah Desa Bandar Klippa dalam pelaksanaan pembangunan desa untuk megoptimalkan kesejahteraan masyarakat.

c) Manfaat bagi peneliti

Sebagai informasi dan pengembangan ilmu tentang pelaksanaan pembangun desa dan tata cara serta pola hubungan tentang partisipasi masyarakat sekaligus sebagai rujukan bagi peneliti selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Landasan Teori

Salah satu unsur yang terpenting dalam penelitian yaitu menyusun landasan teori. Landasan teori ini perlu ditegakkan agar penelitian tersebut mempunyai dasar yang kokoh.

Menurut Sugiyono, teori adalah seperangkat kontruk (konsep), defenisi dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui

spesifikasi hubungan antara variabel sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena.¹

2.2. Teori Partisipasi

2.2.1. Pengertian Partisipatif

Partisipasi merupakan masukan dalam proses pembangunan dan sekaligus menjadi keluaran atau sasaran dari pelaksanaan pembangunan. Partisipasi dalam konteks pembangunan desa mencakup keikutsertaan atau keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan, dan dalam penerapan program yaitu adanya pembagian keuntungan atau manfaat dari hasil pelaksanaan kegiatan serta keterlibatan warga dalam mengevaluasi kegiatan tersebut. Partisipasi dalam pembangunan dipandang sebagai sebuah metodologi yang mengantarkan pelaku-pelakunya untuk dapat memahami masalah masalah yang dihadapi, sehingga dapat menganalisa dan mencari solusi dari masalah yang dihadapi tersebut, sehingga memberikan kerangka untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan.

Menurut Soekanto menegaskan bahwa partisipasi adalah suatu aktivitas untuk mengambil bagian atau peran dalam suatu kegiatan bersama.

Menurut Davis Partisipasi sebagai keterlibatan mental/pikiran dan emosi/perasaan seseorang didalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan.²

Ngusmanto memberikan kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat adalah “Keterlibatan dan kontribusi aktif secara fisik dan mental dalam berbagai kegiatan

¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung:Alfa Beta, 2012, hal 52

²Ngusmanto, *Administrasi Pembangunan*, (Jakarta, Mitra Wacana , 2015), hal.132

bersama, sebagai realisasi akan hak dan kewajiban setiap warga negara dalam rangka mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk itu setiap berbicara partisipatif masyarakat tidak dapat lepas dari:

- a. Adanya keterlibatan dan kontribusi aktif.
- b. Secara fisik dan mental.
- c. Dalam kegiatan bersama.
- d. Menunaikan hak dan kewajiban.
- e. Mencapai tujuan yang telah ditetapkan.³

Conyers menegaskan bahwa ada 3 alasan utama mengapa partisipasi masyarakat menjadi sangat penting. Alasan tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

- Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat yang tanpa adanya ini maka program pembangunan dan proyek-proyek akan gagal.
- Masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut.
- Adanya anggapan bahwa suatu hak demokrasi bila masyarakat yang dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri, yaitu masyarakat mempunyai hak dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan diwilayah mereka.⁴

³ *Ibid*, hal, 133

⁴ *Ibid*, hal 135

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ada beberapa aspek yang dikemukakan oleh Sanof (2009:9) adalah :

- Melibatkan masyarakat dalam mendesain proses pengambilan keputusan dan sebagai hasilnya,meningkatkan kepercayaan mereka,sehingga mereka dapat menerima keputusan dan menggunakan dalam sistem yang telah ada ketika mereka menghadapi sebuah masalah.
- Menyalurkan suara masyarakat dalam perencanaan pengambilan keputusan guna meningkatkan (kuallitas) dari pencapaian dan keputusannya.
- Mengingatkan rasa kebersamaan dengan mengajak masyarakat untuk mencapai tujuan bersama.⁵

Selanjutnya Aprilia Theresia menambahkan bahwa partisipasi masyarakat adalah :Keikutseraan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. Dalam kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat tentang pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu-hidup mereka. Artinya melalui partisipasi yang diberikan, berarti benar-benar menyadari bahwa kegiatan pembangunan bukanlah sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh (aparatur) pemerintah sendiri, tetapi juga menuntut keterlibatan masyarakat yang akan dipenuhi mutu-hidupnya.⁶

Menurut Verhangen, sebagai suatu kegiatan partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian

⁵*Ibid*, hal 137

⁶Aprilia Theresia, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Bandung,alfabeta, 2015, hal 196-197

kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat. Tumbuhnya interaksi dan komunikasi tersebut, dilandasi oleh adanya kesadaran yang dimiliki oleh yang bersangkutan mengenai :

1. Kondisi yang tidak memuaskan, dan harus diperbaiki.
2. Kondisi tersebut dapat diperbaiki melalui kegiatan manusia atau masyarakatnya sendiri..
3. Kemampuannya untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat dilakukan.
4. Adanya kepercayaan diri, bahwa ia dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi kegiatan yang bersangkutan.

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007: 27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

2.2.2. Bentuk-Bentuk Partisipasi

Secara sederhana partisipasi bisa diartikan sebagai keikutsertaan seseorang, kelompok, atau masyarakat dalam program pembangunan. Pernyataan ini mengandung arti seseorang, kelompok atau masyarakat senantiasa dapat memberikan kontribusi/sumbangan yang sekiranya mampu untuk menunjang keberhasilan program pembangunan dengan berbagai bentuk atau jenis partisipasi. Bentuk partisipasi yang dimaksud ialah macamnya sumbangan yang diberikan seseorang, kelompok atau masyarakat yang berpartisipasi diantaranya bentuk-

bentuk partisipasi: partisipasi buah pikiran, yang diberikan partisipan dalam pertemuan atau rapat. Kehadiran seseorang dalam pertemuan akan mempengaruhi bagi masyarakat yang lain agar dapat ikut serta dalam memberikan sumbangsih pemikiran. Partisipasi tenaga, yang diberikan partisipan dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa pertolongan bagi orang lain. Partisipasi harta benda, yang diberikan orang dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain dengan memberikan makanan atau minuman seadanya tanpa ada timbal balik (jasa).

Dusseldrop, mengidentifikasi beragam bentuk-bentuk kegiatan partisipasi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat dapat berupa:

1. Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat.
2. Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok.
3. Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat yang lain.
4. Menggerakkan sumber daya masyarakat.
5. Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan.
6. Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakatnya.⁷

Tingkatan Partisipasi

Dilihat dari tingkatan atau tahapan partisipasi, Wilcox (1968) mengemukakan adanya 5 (lima) tingkatan yaitu :

⁷*Ibid*, Hal 200

1. Memberikan Informasi(*Information*).
2. Konsultasi (*Consultation*), yaitu menawarkan pendapat sebagai pendengar yang baik untuk memberikan umpan balik, tetapi tidak terlibat dalam implementasi ide dan gagasan tersebut.
3. Pengambilan keputusan bersama (*Deciding, together*), dalam arti memberikan dukungan terhadap ide, gagasan, pilihan-pilihan serta mengembangkan peluang yang diperlukan guna mengambil keputusan.
4. Bertindak bersama (*Acting together*), dalam arti tidak sekedar ikut dalam pengambilan keputusan, tetapi juga terlibat dan menjalin kemitraan dalam pelaksanaan kegiatannya.
5. Memberikan dukungan (*Supporting Independent Community Interst*), dimana-mana kelompok local menawarkan pendanaan, nasehat dan dukungan lain untuk mengembangkan agenda kegiatan.⁸

2.2.3. Proses Partisipasi Masyarakat

Program pembangunan yang akan dilaksanakan perlu didiskusikan kepada masyarakat. Hal ini sangat penting apakah program yang akan dilaksanakan tersebut dapat berguna kedepannya, sehingga program-program tersebut dapat benar-benar penting dilaksanakan masyarakat dan menjawab semua permasalahan yang ada di masyarakat. Sosialisasi ini penting tahapan-tahapan peran aktif masyarakat terlaksana secara efektif.

Menurut Kaho dalam bukunya menjelaskan proses partisipasi atau peran aktif masyarakat meliputi tiga tahapan yaitu:

⁸*Ibid*, Hal 202

1. Partisipasi dalam pembuatan keputusan (Perencanaan).
2. Partisipasi dalam pelaksanaan.
3. Partisipasi dalam evaluasi.⁹

Tahap pertama, yaitu tahap pembuatan keputusan (Perencanaan), mempunyai landasan filosofi bahwa orang akan merasa dihargai jika mereka diajak untuk berkompromi, memberikan pemikiran-pemikiran dalam membuat suatu keputusan untuk membangun diri lingkungan, memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah. Keikutsertaan anggota/seseorang didalam pengambilan suatu keputusan secara psikososial telah memaksa anggota masyarakat yang bersangkutan untuk turut bertanggung jawab dalam melaksanakan, mengamankan setiap paket program yang dikomunikasikan. Mereka merasa memiliki serta bertanggung jawab secara penuh atas keberhasilan program yang dilaksanakan.

Tahap kedua, yaitu tahap pelaksanaan, memiliki landasan filosofi bahwa tujuan melibatkan masyarakat dalam tahap pelaksanaan adalah agar masyarakat mengetahui secara baik tentang cara-cara melaksanakan program sehingga nantinya mereka dapat secara mandiri mampu melanjutkan, meningkatkan serta melestarikan program pembangunan yang dilaksanakan.

Tahap ketiga, yaitu tahap dalam evaluasi, masyarakat diarahkan untuk mampu menilai sendiri dengan mengungkapkan tentang apa yang mereka tahu dan lihat. Mereka diberikan kebebasan untuk menilai sesuai dengan apa yang ada di dalam benaknya, pengalaman, kelebihan/kekurangan dan program,

⁹Josef Riwu Kaho, *Prospektif Otonomi Daerah di RI*, Jakarta :PT Raja Grafindo Persada,2007, hal 115

kelemahannya, manfaat, hambatan, faktor pelancar yang mereka hadapi dalam operasionalisasi program dan secara bersama-sama mencari alternative terbaik sebagai bahan pertimbangan bagi pelaksana program atau kegiatan pembangunan di waktu yang akan datang.

2.2.4. Manfaat Partisipasi Masyarakat

Partisipasi akan memberikan manfaat yang penting bagi keberhasilan sebuah organisasi sebagai mana disebut yaitu :

- Lebih memungkinkan diperolehnya keputusan yang benar karena banyaknya sumbangan yang berarti dan positif.
- Mengedepankan komunikasi dua arah sehingga baik bawahan maupun atasan memiliki kesempatan yang sama dalam mengajukan pemikiran.
- Mendorong kemampuan berfikir kreatif dan kepentingan bersama.
- Melatih untuk bertanggung jawab serta mendorong untuk membangun kepentingan bersama.
- Memungkinkan untuk mengikuti setiap perubahan yang terjadi.¹⁰

2.3. Teori Pembangunan

2.3.1. Pengertian Pembangunan

Pembangunan adalah suatu perubahan dalam segala bidang untuk mengarah kearah yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Pembangunan desa yang dilaksanakan guna meningkatkan kehidupan masyarakat. Pembangunan bertujuan untuk memberikan kehidupan yang lebih makmur dan sejahtera bagi masyarakat,

¹⁰ <http://id.wikipedia.org/wiki/Partisipasi>, Ross 1967, Diakses 01 juli 2018

dalam upaya pembangunan partisipasi masyarakat mempunyai peran yang sangat penting karena pembangunan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat itu sendiri dan dengan adanya peran partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan diharapkan hasil dari pembangunan sesuai dengan apa yang diharapkan dan dibutuhkan oleh daerah tersebut. Partisipasi masyarakat sebagai strategi pendukung dalam mengatasi permasalahan pembangunan desa sangatlah penting peranannya, seperti kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, dan membiayai pembangunan.

Siagian mengatakan pengertian pembangunan adalah sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation bilding*).¹¹

Menurut Saul M.Katz dalam Tjokrowinoto Pembangunan adalah pergeseran dari satu kondisi nasional yang satu menuju ke kondisi nasional yang dipandang lebih baik.

Menurut Todaro (2000:20) Pembangunan sebagai suatu proses perbaikan yang berkesinambungan atas suatu masyarakat atau suatu sistem sosial secara keseluruhan menuju kehidupan yang lebih .¹²

2.3.2. Tujuan dan Sasaran Perencanaan Pembangunan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, dalam rangka mendorong proses pembangunan secara terpadu dan efisien, pada dasarnya

¹¹Sondang P.Siagian, *Administrasi Pembangunan* Jakarta: Buami aksara, 2009, hal 4

¹²Ngusmanto, *Op.cit*, hal 27

perencanaan pembangunan nasional di Indonesia mempunyai 5 tujuan dan fungsi pokok. Tujuan dan sasaran pokok tersebut adalah sebagaiberikut :

1. Mendukung Koordinasi antar pelaku pembangunan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah, waktu dan fungsi pemerintah, baik pusat maupun daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, dan adil.¹³

2.3.3. Prinsip Penyelenggaraan Pembangunan Nasional

Istilah pembangunan nasional dipergunakan oleh berbagai kelompok dimasyarakat dengan persepsi dan konotasi yang berbeda-beda. Sementara warga masyarakat mungkin mempergunakan istilah tersebut hanya dalam konteks pembangunan ekonomi semata-mata. Sesungguhnya persepsi yang lebih mendekati kebenaran ialah bahwa istilah “Pembangunan Nasional” harus dilihat dalam konteks terdapat kesepakatan yang mengatakan bahwa pembangunan nasional harus mencakup segala segi kehidupan dan pengidupan bangsa dan Negara yang bersangkutan, meskipun dengan skala prioritas yang berbeda dari satu Negara ke Negara lain.

¹³Syafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonomi*, Jakarta:Rajawali Pers, 2014 , hal 4

Sepuluh Prinsip Penyelenggaraann Pembangunan Nasional.

Pembangunan nasional pada umumnya diselenggarakan dengan berpedoman pada beberapa prinsip yang dalam karya tulis ini penulis secara sadar dan sengaja batasi pada hanya sepuluh prinsip yaitu :

- Kesemestaan

Yang dimaksud dengan prinsip kesemestaan disini ialah bahwa pembangunan nasional harus bersifat komprehensif. Artinya cakupan bidang-bidang pembangunan itu harus meliputi seluruh segi kehidupan dan penghidupan masyarakat bangsa. Menyadari bahwa kehidupan dan penghidupan masyarakat modern mencakup segi-segi yang amat luas, wajar dan lumrah apabila diadakan kategorisasi dari pada segi-segi kehidupan dan penghidupan dimaksud. Kategorisasi itu menjadi sangat penting apabila dihubungkan dengan seluruh proses penyelenggaraan dan pengelolaan pembangunan nasional. Kategorisasi tersebut bukan saja akan mempermudah pengambilan berbagai langkah dalam proses pengelolaan kegiatan-kegiatan pembangunan, akan tetapi juga dalam menentukan skala prioritas nasional dengan alokasi pembiayaan.

- Partisipasi Rakyat

Adalah merupakan kenyataan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat dinegara-negara yang sedang berkembang bahwa peranan pemerintah bersama seluruh jajaran aparatnya dalam proses pengelolaan pembangunan nasional bersifat dominan. Proses pengelolaan pembangunan nasional tampaknya telah sepakat bahwa betapa pun dominannya peranan pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan nasionalnya ,tidak mungkin keseluruhan beban

menyelenggarakan pembangunan itu dipikul oleh pemerintah beserta seluruh aparaturnya, betapa pun tingginya disiplin dan dedikasi aparatur tersebut. Dengan perkataan lain, keberhasilan penyelenggaraan pembangunan nasional menurut partisipasi masyarakat. Tanpa terperangkap ke dalam jargonisme, mungkin dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat itu dapat berbentuk pasif, akan tetapi lebih baik lagi apabila ia bersifat aktif. Partisipasi pasif dapat berarti bahwa dalam sikap, perilaku dan tindakannya, rakyat tidak melakukan hal-hal yang dapat menghalangi kelancaran jalannya roda pembangunan nasional. Sedangkan partisipasi aktif dapat terwujud dalam berbagai bentuk, seperti :

1. Turut memikirkan nasib sendiri dengan memanfaatkan lembaga-lembaga sosial politik yang ada dimasyarakat sebagai saluran aspirasinya.
 2. Menunjukkan adanya kesadaran bermasyarakat dan bernegara yang tinggi dengan tidak menyerahkan penentuan nasibnya kepada orang lain, seperti kepada pimpinan dan tokoh masyarakat yang ada, baik yang sifatnya formal maupun informal.
 3. Memenuhi kewajiban sebagai warga Negara yang bertanggung jawab seperti membayar pajak secara jujur serta kewajiban lainnya.
 4. Ketaatan kepada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 5. Kerelaan melakukan pengorbanan yang dituntut oleh pembangunan demi kepentingan bersama yang lebih luas dan yang lebih penting.
- Kesimbangan

Pembangunan nasional harus memiliki ciri kesemestaan, yang berarti bahwa pembangunan nasional itu harus mencakup seluruh segi kehidupan dan penghidupan bangsa dan Negara. Berarti bahwa secara konseptual pembangunan nasional harus pula seimbang dalam arti bahwa sesuatu bidang pembangunan tidak dapat dipandang lebih penting dari bidang yang lain. Bahwa sesuatu bidang tertentu didahulukan pelaksanaannya kiranya tidak merupakan masalah karena memang cara berpikir yang logis pun akan menuntut pelaksanaan yang didasarkan atas suatu skala prioritas yang jelas.

- Kontinuitas

Suatu premise mendasar yang berlaku bagi penyelenggara pembangunan nasional ialah bahwa cita-cita akhir suatu bangsa dan Negara tidak akan tercapai dalam satu kurun waktu pembangunan, misalnya lima tahun, juga tidak akan tercapai dalam satu generasi bahkan seperti telah dikatakan dimuka, konsepsi yang bersifat relative seperti keadilan sosial, kemakmuran yang merata, perlakuan yang sama dimata hukum, kesejahteraan, ketentraman dan kondisi ideal lainnya tidak akan mencapai titik jenuh absolute yang berarti bahwa usaha mewujudkannya harus terus-menerus. Dengan demikian berarti bahwa diperlukan kesinambungan pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan nasional itu dan satu tahap pembangunan hanyalah satu rantai dari satu mata rantai yang amat panjang.

- Pendekatan kesisteman

Pendekatan kesisteman adalah suatu cara yang tepat untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah-masalah yang rumit. Tetap oleh karna dengan

pendekatan kesisteman, seseorang suatu pemerintah dan bahkan suatu bangsa diharuskan untuk menelaah sesuatu permasalahan dalam totalitasnya, baik dalam arti ramifikasi dari permasalahan yang dihadapi itu maupun dalam menentukan alternatif-alternatif pemecahannya. Dengan perkataan lain, pendekatan kesisteman akan memungkinkan dipecahkannya suatu masalah secara tuntas.

Pentingnya pendekatan kesisteman dalam memecahkan suatu masalah akan lebih jelas lagi terlihat apabila diingat bahwa penyelenggaraan pembangunan nasional melibatkan berbagai unsur dan komponen masyarakat yang semuanya merupakan bagian atau dalam bahasa “sistem” merupakan sub sistem dalam kerangka suatu totalitas yang tingkat interdependensinya, interelasi dan interaksinya turut menentukan berhasil tidaknya pembangunan nasional diselenggarakan. Ditinjau dari segi pembangunan nasional Negara sebagai keseluruhan merupakan suatu totalitas artinya merupakan suatu sistem yang terdiri dari sub sistem. Apa yang kemudian dilihat sebagai sub sistem sangat tergantung dari maksud, tujuan dan sasaran dari pada pembagian yang dilakukan. Misalnya dalam kehidupan bernegara ekonomi, politik, sosial, budaya dan keamanan nasional dipandang sebagai sub sistem. Pendekatan demikian barang kali dapat dikatakan sebagai pendekatan pembedaan, pendekatan pembedaan dapat diambil sebagai contoh. Pendekatan kesisteman adalah kaitan ini berarti bahwa bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial budaya dan bidang keamanan nasional masing-masing merupakan sub sistem dalam pembangunan nasional. Pendekatan kesisteman dapat member sumbangan yang berarti bukan saja pada

tingkat konseptualisasi permasalahan, akan tetapi juga dalam pemecahan secara integral.

- Mengandalkan Kekuatan Sendiri

Kemerdekaan dan kedaulatan suatu Negara bangsa tidak hanya terbatas pada bidang-bidang tertentu seperti bidang politik, atau ekonomi dan sebagainya dengan menyadari sepenuhnya bahwa dalam dunia modern sekarang ini merupakan kenyataan, dan bahkan keharusan, untuk bergaul dengan bangsa-bangsa lain, baik pada tingkat regional maupun pada tingkat global, dengan bangsa-bangsa dan Negara lain. Suatu Negara merupakan suatu sub sistem dalam tata pergaulan bangsa-bangsa didunia, interdependensi, interelasi dan interaksi dengan Negara bangsa lain memang tidak dapat dielakkan, dan bahkan harus ditumbuhkan, dikembangkan dan dipelihara terus-menerus atas dasar persamaan hak dan derajat.

- Kejelasan Strategi Dasar

Strategi dasar merupakan alat yang amat penting artinya dalam menentukan bentuk, jenis dan sifat berbagai kegiatan yang maknanya mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan nasional. Karna maknanya yang fundamental, suatu strategi dasar penyelenggaraan pembangunan nasional biasanya hanya mengandung pedoman pokok sebagai pegangan utama yang dalam proses selanjutnya perlu dan memang dijabarkan dalam rencana dan program kerja dan juga dalam banyak hal dituangkan menjadi proyek-proyek pembangunan. Sebagai pedoman pokok suatu strategi dasar harus pula bersifat kompherensif. Dengan perkataan lain suatu strategi dasar perlu memuat berbagai hak berikut seperti:

1. Revelansi antara tujuan akhir yang hendak dicapai dengan sasaran-sasaran antara yang hendak diwujudkan.
2. Dengan pemikiran yang melatarbelakangi perumusan dan penentuan strategi dasar tersebut.
3. Pendekatan falsafati yang dipergunakan.
4. Situasi ideal yang dicita-citakan.
5. Kendala-kendala yang sangat mungkin dihadapi dalam mengoperasionalkan strategi dasar yang telah ditetapkan.
6. Masalah-masalah yang diperkirakan akan timbul dalam operasional strategi termasuk.
7. Berbagai alternatif yang mungkin ditempuh untuk mengatasi kendala maupun dalam memecahkan masalah yang diperkirakan akan timbul.

Jelaslah bahwa perumusan suatu strategi dasar merupakan kegiatan konseptualisasi diri kondisi yang diperkirakan akan dihadapi dimasa depan, baik yang sifatnya jangka panjang maupun sifatnya jangka sedang dengan segala dampaknya terhadap pembangunan nasional. Kiranya menjadi jelas pula bahwa dalam strategi dasar segi-segi teknis dari operasionalisasi strategi dasar itu tidak perlu mendapat pertimbangan khusus meskipun tidak ada salahnya walaupun hal tersebut disinggung. Revelansi antara tujuan akhir yang ingin dicapai dengan sasaran-sasaran antara yang hendak diwujudkan perlu mendapat perhatian khusus. Revelansi itu amat penting karna tanpa revelansi yang dirumuskan dengan jelas itu tidak mustahil terdapat penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan yang apabila terejadi bahkan dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan. Oleh

karna itu, demi terselenggaranya pembangunan nasional secara berdaya guna dan berhasil guna adalah amat penting bagi para penyusun dan penentu strategi dasar pembangunan nasional itu untuk memuat bahan-bahan pemikiran yang digunakan sebagai latar belakang dalam penyusunan dan penentu strategi dasar tersebut sehingga para penyelenggara mengetahui dengan pasti bentuk dan materi dan strategi dasar itu menjadi demikian. Untuk jelasnya, dapat dinyatakan bahwa suatu strategi dasar pada hakikatnya merupakan komitmen politik suatu Negara bangsa untuk melaksanakan pembangunan nasional.

- Skala Prioritas Yang Jelas.

Pemikiran yang rasional dan realistis memberikan petunjuk bahwa dalam melakukan suatu upaya besar, seperti halnya dengan penyelenggara pembangunan nasional tidak mungkin semua bidang dan tidak mungkin pula semua masalah dapat ditangani secara intensitas yang sama. Tidak mungkin, terutama oleh karena keterbatasan kemampuan untuk itu, disamping karena faktor kelangkaan dana dan data yang selalu dihadapi. Oleh karena itu salah satu prinsip pembangunan nasional ialah adanya skala prioritas yang jelas. Biasanya dalam menentukan suatu prioritas beberapa pertimbangan yang dipergunakan adalah:

1. Pengkajian yang mendalam tentang bidang-bidang apa saja dalam hal keterbelakangan bangsa dan Negara paling dirasakan.
2. Penentuan pilihan pada bidang yang dirasakan paling mendesak untuk didahulukan.

3. Pembangunan dalam bidang yang diperhitungkan akan mempunyai dampak yang paling menentukan dalam melanjutkan perjuangan bangsa dan Negara, baik dalam rangka mempertahankan eksistensinya maupun dalam mengejar pertumbuhan yang diharapkannya.
4. Pembangunan yang diperhitungkan akan memberikan manfaat yang terbesar untuk dinikmati oleh sebagian besar warga masyarakat.
5. Pemanfaatan secara maksimal dari kekuatan dan kemampuan nasional.
6. Kondisi yang paling menguntungkan dalam menyelenggarakan pembangunan nasional.
7. Maksimalisasi pemanfaatan kemampuan yang ada baik yang riil maupun yang potensial.

- Kelestarian Ekologi

Memberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap kelestarian ekologis menjadi lebih penting lagi apabila diingat bahwa kekayaan alam beserta pemeliharaan kesimbangannya dengan lingkungan dapat digolongkan kepada dua teori kategori utama yaitu:

1. Kekayaan alam yang tidak mungkin diperbaharui.
2. Kekayaan alam yang memang mungkin untuk diperbaharui.

- Pemerataan Disertai Pertumbuhan

Hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai dalam hal ini terutama hasil-hasil pembangunan ekonomi harus sudah dapat mulai dinikmati oleh masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah akan tetapi tidak dibagi habis

sehingga tetap tersedia kemampuan yang semakin meningkat untuk mencapai hasil yang lebih besar dimasa yang akan datang.

Demikianlah sepuluh prinsip penyelenggaraan pembangunan nasional yang umum diterapkan oleh Negara-negara yang sedang membangun. Kesemua itu dalam rangka usaha Negara bangsa yang bersangkutan untuk meningkatkan mutu hidup rakyat masing-masing yang menjadi salah satu komponen dari tujuan akhir Negara bangsa yang bersangkutan.

2.3.4. Ciri-ciri Rencana Pembangunan Yang Baik

Adapaun ciri-ciri pembangunan yang baik yaitu:

- Suatu rencana harus mempermudah seluruh usaha untuk mencapai tujuan.
- Penyusunan rencana tidak bisa diserahkan kepada sekelompok orang yang kedalaman persepsi dan pengetahuannya tentang hakiki dari pada tujuan yang hendak dicapai masih diragukan.
- Para penyusun rencana harus terdiri dari para tenaga profesional yang disamping ahli dan terampil dalam menggunakan berbagai teknik perencanaan juga telah memiliki pengalaman praktek dilapangan.
- Pada umumnya betapa pun matangnya suatu rencana disusun, ia hanya tetap menagandung hal-hal yang masih umum sifatnya dan oleh karnanya perlu dijabarkan ke dalam program kerja .Oleh karna itu dalam rencana yang baik harus terdapat petunjuk yang jelas tentang substansi dan teknik penjabaran yang memang harus dilakukan sebelum melaksanakan.
- Rencana yang baik tidak boleh terlepas dari pemikiran pelaksanaan.

- Kesederhanaan bentuk dan isi merupakan ciri penting dari suatu rencana yang baik. Yang dimaksud dengan kesederhanaan disini hakikatnya adalah bahwa suatu rencana yang baik menggambarkan secara jelas skala prioritas yang logis, mudah dipahami oleh mereka yang akan terlibat dalam pelaksanaan perencanaan.
- Keluwesan sebagai cara satu rencana yang baik. Kekuatan dalam rencana dapat berakibat kesukaran dalam melakukan penyesuaian-penyesuaian yang pasti harus dilakukan.
- Adanya ruang pengambilan resiko yang telah diperhitungkan sebelumnya.
- Pragmatisme sebagai ciri rencana. Artinya dalam perencanaan, pendekatan harus dihindari dengan memperhitungkan tujuan yang hendak dicapai, kemampuan riil dan potensial yang terdapat dalam organisasi, faktor-faktor lingkungan yang turut berpengaruh, kesempatan yang diperkirakan akan tersedia dimasa depan serta dampak faktor ketidakpastian yang harus diperhitungkan sejauh mungkin.
- Aktualitas sebagai ciri rencana. Yang dimaksud dengan aktualitas adalah penggabungan yang operasional antara teori dan praktek dilapangan karena rencana yang disusun secara ilmiah hanya ada manfaatnya apabila dapat dilaksanakan dalam keadaan nyata dilapangan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.¹⁴

2.3.5. Peran Aparatur Pemerintah Dalam Proses Pembangunan

¹⁴ Ibid, hal 89-91

Telah dikatakan di muka bahwa betapa pun aktifnya masyarakat berpartisipasi dalam proses pembangunan nasional, pemerintah dengan seluruh jajaran aparatnya tetap memainkan peranan yang sangat penting.

Peranan yang penting- atau bahkan dominan itu –terlihat dalam lima wujud utama,yaitu:

1. Peranan selaku modernisator.
2. Peranan selaku katalisator.
3. Peranan selaku dinamisator.
4. Peranan selaku stabilisator.
5. Peranan selaku pelopor.¹⁵

- Peranan selaku Modernisator

Pemerintah bertugas untuk mengiringi masyarakat kearah kehidupan modern, yaitu kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemampuan dan kemahiran manajerial, kemampuan mengelolah kekayaan alam, memiliki sistem pendidikan nasional yang handal sehingga mampu menghasilkan SDM yang produktif, memiliki landasan kehidupan politik yang kukuh dan demokratis, memiliki visi yang jelas tentang masa depan, rakyat mampu mengambil keputusan yang rasional tentang nasibnya, bersedia mengambil resiko dan orientasi masa depan, serta bersedia menerima perubahan.

- Peranan selaku katalisator

¹⁵ *Ibid*, hal 194

Pemerintah yang dikatakan berperan sebagai seorang katalisator apabila pemimpin tersebut berperan selalu meningkatkan penggunaan segala sumber daya manusia yang ada, berusaha member reaksi yang memberikan semangat dan daya kerja cepat semaksimal mungkin, serta selalu tampil sebagai pelopor dan pembawa perubahan.

- Peranan selaku dinamisator

Peran pemerintah sebagai penggerak partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyukuh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan.

- Peranan selaku stabilisator

Pemerintah harus mampu menciptakan adanya keadaan politik sosial dan ekonomi yang stabil dan mantap. Di bidang politik misalnya, pemerintah terus berupaya mengamalkan, mengamankan, dan mempertahankan ideologi Negara Pancasila dari macam upaya untuk merusak nilai negeri. Di bidang sosial, pemerintah berupaya menanamkan nilai-nilai budaya bangsa yang telah menjadi milik bangsa Indonesia sejak lama, agar masyarakat tidak terpengaruh nilai-nilai yang negatif. Di bidang ekonomi, pemerintah berupaya membangun berbagai macam sektor ekonomi secara merata diseluruh daerah guna meningkatkan pendapatan rakyat.

- Peranan selaku pelopor

Pemerintah harus menjadi panutan bagi seluruh masyarakat, baik buruknya perilaku yang dipraktikkan oleh orang-orang yang berada dilembaga pemerintahan juga memberikan pengaruh besar terhadap masyarakat.

2.4. Pengertian Pembangunan Desa

2.4.1. Pembangunan Desa

Pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah terutama dalam memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan pembinaan, dan pengawasan agar dapat ditingkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha menaikkan taraf hidup dan kesejahteraanya.

Pembangunan Desa adalah pembangunan yang dilaksanakan didesa secara menyeluruh dan terpadu dengan imbalan kewajiban yang serasi antara pemerintah dan masyarakat diaman pemerintah wajib memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan dan fasilitas yang diperlukan, sedangkan masyarakat memberikan partisipasinya dalam bentuk swakarsa dan swadaya, gotong royong masyarakat pada setiap pembangunan yang diinginkan. Khususnya pembangunan desa sudah merupakan kewajiban pemerintah pusat maupun daerah atau masyarakat desa untuk memperhatikan pembangunan dan tingkat ekonomi masyarakat, pembangunan nasional terletak pada pembangunan dari bawah yaitu desa khususnya adalah terciptanya landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatan sendiri, membangun masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila, dilakukan secara bertahap dengan sasaran yang makin meningkat.

Berkenaan dengan pembangunan desa, Daeng Sudirvo, (1981;63), mendefinisikan pembangunan desa sebagai berikut:

Pembangunan desa adalah proses perubahan yang terus menerus dan berkesinambungan yang diselenggarakan oleh masyarakat beserta pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin, materi dan spiritual berdasarkan Pancasila yang berlangsung di desa.¹⁶

2.4.2. Pengertian Desa

Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat (12) menyebutkan “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia”. Pengertian desa menurut Hawwidjaja berpendapat bahwa “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.”¹⁷

Hawwidjaja berpendapat bahwa pemberdayaan masyarakat adalah “Penyelenggaraan pemerintah desa dan diabdikan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat”.¹⁸

¹⁶[http://merwati.gun.blogspot.com/2012/13/Konsep Pembangunan Desa](http://merwati.gun.blogspot.com/2012/13/Konsep_Pembangunan_Desa), Bandung. Univ Padjajaran diakses pada tanggal 01 juli 2018

¹⁷Haw Widjaja, *Otonomi Desa*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008, hal 114

¹⁸Haw Widjaja, Op.Cit hal 37

2.4.3. Pelaksanaan

Dengan adanya rencana pembangunan yang telah didiskusikan sebelumnya dengan masyarakat, maka pembangunan desa tersebut harus dilaksanakan dengan baik. Ginanjar menegaskan bahwa pelaksanaan pembangunan pada hakikatnya melibatkan 3 (tiga) faktor yaitu :

- Manusia dengan beragam perilaku.
- Faktor dana yang tergantung pada kemampuan keuangan Negara.
- Faktor alam yang sulit diramalkan.

Untuk itu, agar pelaksanaan pengawasan pembangunan mencapai hasil yang optimal maka fokus pengawasan perlu diarahkan kepada pemanfaatan ketiga faktor tersebut. Lebih khusus lagi, pengawasan pembangunan lebih menekankan pada pengawasan penggunaan dan pemanfaatan sumber daya manusia dan uang untuk menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan.¹⁹

2.5. Pengawasan

2.5.1. Pengawasan Pembangunan

Pada dasarnya pengawasan berarti pengamatan dan pengukuran pelaksanaan sesuatu pekerjaan dan hasil yang dicapai dibandingkan dengan sasaran dan standard yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan pengawasan antara lain adalah agar supaya semua kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana dan program kerja yang telah ditentukan sebelumnya. Dari pengertian diatas kiranya jelas terlihat bahwa ada kaitan langsung antara perencanaan dan pengawasan. Jika

¹⁹Ngusmanto, Op.Cit hal 75

dilihat dari prosesnya, maka apabila suatu rencana sedang dilaksanakan serta merta pengawasan diperlukan untuk mengukur kemajuan yang telah dicapai, menemukan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi dan mengambil langkah-langkah perbaikan dalam proses pelaksanaan itu apabila diperlukan, karena untuk mencegah penyimpangan itu merupakan salah satu tujuan pula dari pengawasan.

Mengingat bahwa seluruh kegiatan pembangunan diselenggarakan oleh suatu organisasi dalam hal ini suatu Negara untuk mencapai tujuan akhirnya, dan mengingat pula bahwa pembangunan dilaksanakan oleh manusia yang tidak luput dari berbagai kekurangan, kelemahan dan bahkan kesalahan, maka dapat dikatakan bahwa keberhasilan penyelenggaraan semua kegiatan pembangunan untuk tingkat yang dominan tergantung pada falsafah, jenis, intensitas dan efektifitas pengawasan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang memang mempunyai wewenang untuk melakukannya.

Untuk kegiatan-kegiatan pembangunan, jenis pengawasan yang perlu dilakukan ditentukan pula antara lain oleh jenis-jenis aparat pengawasan yang sifatnya melembaga, baik yang sifatnya intern bagi organisasi penyelenggara maupun yang sifatnya ekstern, termasuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat yang sering dikenal dengan pengawasan sosial.

Akan tetapi apapun jenis pengawasan yang dilakukan itu sasaran yang utama adalah:

- Pengawasan yang ditunjukan kepada kegiatan yang bersifat fisik.

- Pengawasan mengenai penggunaan anggaran pembangunan yang telah dialokasikan untuk membiayai kegiatan tertentu.
- Pengawasan pelaksanaan kebijaksanaan yang telah ditetapkan sebelumnya.
- Pengawasan terhadap bidang kepegawaian dengan segala seginya.
- Pengawasan terhadap penggunaan logistik yang tersedia untuk mendukung kegiatan operasional.
- Pengawasan yang dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya standard mutu hasil pekerjaan.
- Pengawasan terhadap prosedur kerja yang harus ditaati oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan operasional.

Pelaksanaan kegiatan pengawasan hanya dapat dikatakan efektif apabila kegiatan pengawasan itu sesuai dengan setiap rencana yang telah ditetapkan, cocok bagi organisasi yang bersangkutan, memenuhi kebutuhan organisasi dan mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi organik manajemen lainnya.²⁰

2.5.2. Asas-asas Pengawasan Yang Efektif

- Revelansi langsung pengawasan dengan pencapaian tujuan. Revelansi ini merupakan asas pertama dari pengawasan yang efektif. Artinya, pengawasan yang efektif harus mempunyai revelansi langsung dengan tujuan yang hendak dicapai, khususnya tujuan jangka sedang dan jangka pendek sebagai bagian dari tujuan jangka panjang. Dengan perkataan lain,

²⁰Sondang P.Siagian, Op.Cit, hal 27-29

pengawasan bukanlah pengawasan yang efektif karena pengawasan demikian justru dapat menambah beban organisasi tanpa ada kontribusinya terhadap percepatan pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

- Pengawasan mengurangi subyektivitas, dalam mengukur hasil yang dicapai ini merupakan asas yang kedua. Para pimpinan, sebagai manusia, tidak pula luput dari berbagai kelemahan dan kekurangan, tidak berbeda dari para anak buahnya. Akan tetapi karena kedudukannya dan jabatan kepemimpinannya ia berada pada posisi yang lebih dominan.
- Sifat pengawasan dengan cakupan kegiatan yang dilaksanakan. Bukanlah sekedar klise administratif apabila dikatakan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh seseorang direktur utama dari suatu perusahaan besar pasti berbeda dengan pengawasan yang perlu dilakukan oleh seorang manajer suatu usaha kecil di mana ia sekaligus menjadi pemilik. Dengan analogi demikian bahwa lalu dapat dikatakan bahwa dikaitkan dengan pengawasan pembangunan nasional, pengawasan yang dilakukan terhadap pembangunan suatu jembatan, misalnya akan berbeda dengan pengawasan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan masyarakat desa.
- Pengawasan harus mampu mendeteksi penyimpangan sedini mungkin. Ini adalah asas yang keempat. Dimuka telah dikatakan bahwa tindakan yang bersifat preventif akan lebih efektif dan lebih hemat dalam menghindari penyimpangan ketimbang usaha memperbaiki dan meluruskan penyimpangan yang telah terjadi. Mendeteksi sedini mungkin

penyimpangan yang terjadi sesungguhnya berkaitan erat dengan sistem pelaporan yang berlaku dalam suatu organisasi.

- Pengawasan harus berorientasi ke masa depan. Asas yang kelima ini pada dasarnya berarti bahwa jika diterima pendapat yang mengatakan bahwa perencanaan merupakan pemikiran yang matang dan keputusan yang dibuat sekarang untuk kepentingan masa depan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, maka pengawasan pun harus pula mewujudkan pandangannya pada masa depan itu.
- Pengawasan ditunjukkan kepada hal-hal yang mempunyai nilai strategis. Artinya jika penyimpangan terjadi dalam kegiatan yang bernilai strategis tersebut, maka akan terasa dampak kuat yang tentunya bersifat negatif terhadap efisiensi dan efektifitas usaha yang pada gilirannya dapat menjadi penghalang ke arah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- Sikap yang luwes dalam pengawasan. Asas ini merupakan usaha yang teratur dan terarah untuk lebih menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan-kegiatan operasional sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.
- Pelembagaan kegiatan pengawasan, Asas pengawasan ini pada dasarnya berarti terdapat berbagai pihak yang mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan pengawasan secara melembaga. Sebagaimana diketahui pengawasan merupakan salah satu fungsi organik

manajemen. Berarti, salah satu fungsi seorang eksekutif adalah melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan.²¹

2.6. Kesejahteraan Masyarakat

Tujuan dari pembangunan tidak lain yaitu untuk mensejahterakan masyarakat. Siapapun orangnya pasti ingin sejahtera baik itu di kota maupun di desa semua pasti mendambakan kehidupan yang sejahtera. Tetapi tidak semua masyarakat merasakan yang namanya sejahtera pasang surut kehidupan membuat manusia selalu berusaha untuk mencari cara agar tetap sejahtera mulai dari bekerja dan lain sebagainya.

Kesejahteraan sosial dalam artian yang sangat luas mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik, taraf hidup yang lebih baik ini tidak hanya diukur secara ekonomi dan fisik belaka, tapi juga ikut memperhatikan aspek sosial, mental dan segi kehidupan spiritual. Kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai kondisi sejahtera dari suatu masyarakat, kesejahteraan sosial pada umumnya meliputi kesehatan, keadaan, ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup masyarakat. Kesejahteraan sosial tidak bisa ditangani oleh sepihak dan tanpa terorganisir secara jelas kondisi sosial yang dialami masyarakat.

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan usaha yang terencana dan melembaga yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial. Suharto mengatakan bahwasanya tujuan

²¹*Ibid*, hal 230-238

pembangunan kesejahteraan sosial adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh yang mencakup :

1. Peningkatan standar hidup, melalui seperangkat pelayanan sosial dan jaminan sosial segenap lapisan masyarakat, terutama kelompok masyarakat yang kurang beruntung dan rentan yang sangat memerlukan perlindungan sosial.
2. Peningkatan keberdayaan melalui penetapan sistem dan kelembagaan ekonomi, sosial dan politik yang menjunjung harga dan martabat kemanusiaan.
3. Penyempurnaan kebebasan melalui perluasan aksesibilitas dan pilihan-pilihan kesempatan sesuai dengan aspirasi, kemampuan dan standard kemanusiaan.²²

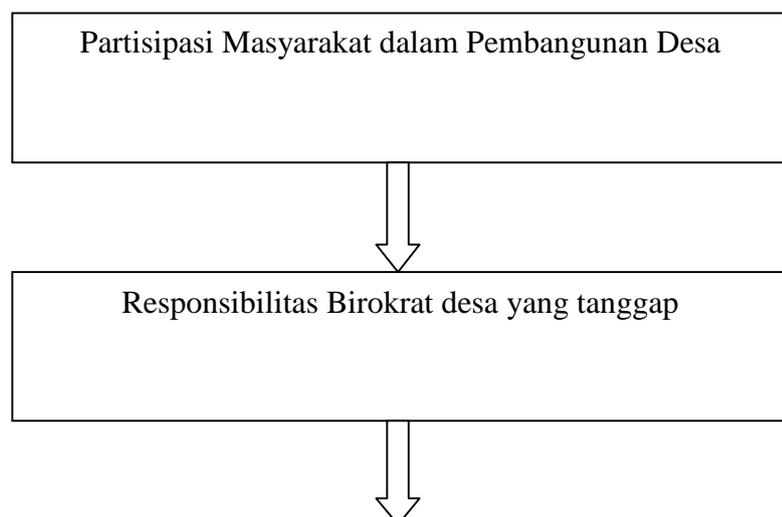
2.7. Defenisi Konsep

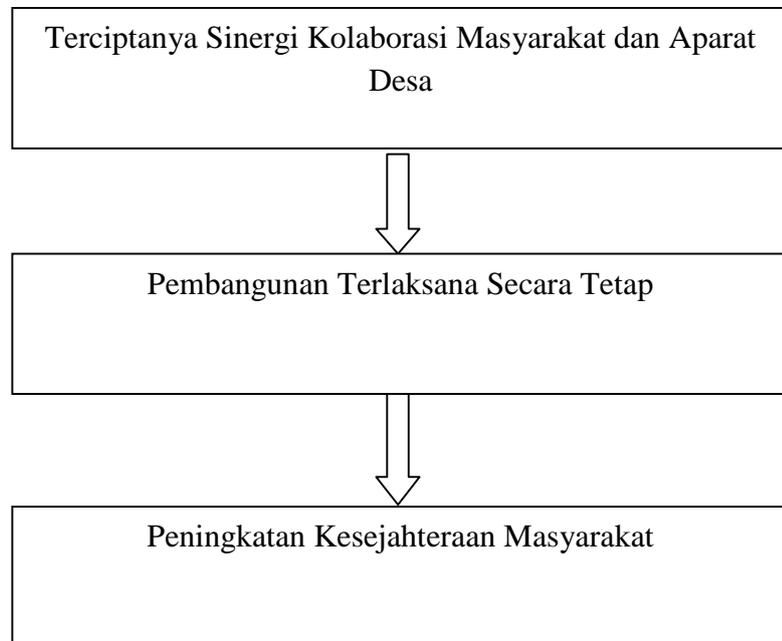
Konsep adalah generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu, sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan berbagai fenomena yang sama. “Konsep merupakan suatu kesatuan pengertian tentang suatu hal atau persoalan yang dirumuskan. Dalam merumuskan kita harus dapat menjelaskan sesuai dengan maksud yang dipakai.

²²[https://jawahirhotowi.wordpress.com/2009/01/28/Kesejahteraan Masyarakat](https://jawahirhotowi.wordpress.com/2009/01/28/Kesejahteraan-Masyarakat) ,diakses pada 01 juli 2018

1. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah keterlibatan masyarakat langsung maupun tidak langsung melalui gagasan atau ide yang disumbangkan dalam proses pembangunan, pelaksanaan, serta evaluasi untuk perubahan yang direncanakan dan pertumbuhan menuju perbaikan yang diharapkan.
2. Pembangunan desa adalah seluruh rangkaian usaha yang dilakukan lingkungan desa yang bertujuan untuk mempertinggi taraf hidup masyarakat desa, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat dengan rencana yang dibuat atas dasar musyawarah dikalangan masyarakat desa.
3. Kesejahteraan sosial masyarakat adalah suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, pendidikan, perumahan dan kesehatan.

2.8 Kerangka Berpikir





2.9. Defenisi Operasional Variabel

Defenisi operasional variabel merupakan unsur penelitian yang memberikan petunjuk bagaimana suatu variable itu dapat diukur sehingga pengukuran ini dapat diketahui indikator-indikator apa saja sebagai pendukung untuk dianalisa dari variable tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka indicator yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Variabel	Dimensi	Indikator
Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa	Partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan.	1.Musyawaharh. 2.Kehadiran rapar 3.Ide
	Partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan (Implementasi) Pembangunan.	1.Tenaga 2.Uang 3.Barang 4.Informasi yang berguna bagi pelaksanaan pembangunan
	Partisipasi masyarakat dalam evaluasi program pembangunan	1. Pengukuran kinerja 2.Penilaian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian ini digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Sugiyono berpendapat bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen), dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.²³

Sedangkan Creswell berpendapat bahwa penelitian kualitatif merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang dianggap berasal dari masalah social kemanusiaan.²⁴

Artinya saat melakukan penelitian di lapangan peneliti tidak boleh terlalu banyak menuliskan tentang topik atau populasi yang

²³Sugiyono, *Ibid*, hal 9

²⁴Jhon W Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif Kuantitatif Dan Mixed*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, Edisi ketiga, hal 4

sedang diteliti melainkan peneliti harus berusaha banyak mendengar opini dan membangun pemahaman berdasarkan apa yang didengar.²⁵

Metodologi penelitian merupakan sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Metodologi juga merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban. Hakekat penelitian dapat dipahami dengan mempelajari berbagai aspek yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian. Strategi-strategi penelitian merupakan jenis-jenis rancangan penelitian kualitatif, kuantitatif, dan campuran yang menetapkan prosedur-prosedur khusus dalam penelitian²⁶.

Oleh karena itu metode yang akan digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Pada umumnya alasan menggunakan metode kualitatif karena, permasalahan belum jelas, holistik, kompleks, dinamis dan penuh makna sehingga tidak mungkin data pada situasi sosial tersebut dijangkau dengan metode penelitian kuantitatif dengan instrumen seperti test, kuesioner, pedoman wawancara. Selain itu peneliti bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan pola, hipotesis dan teori. Pendekatan kualitatif diartikan sebagai pendekatan yang menghasilkan data, tulisan dan tingkah laku yang dapat di amati. Penelitian deskriptif digunakan untuk untuk menggambarkan atau melukiskan apa yang

²⁵Ibid, hal 41

²⁶Ibid, hal 17

sedang diteliti dan berusaha memberikan gambaran yang jelas dan mendalam tentang apa yang sedang diteliti yang menjadi pokok permasalahan.

3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.

3.3. Informan Penelitian

Informan adalah seorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat, dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan atau data-data yang dapat membantu dalam memenuhi persoalan/permasalahan.

Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan penulis yaitu *Nonprobability Sampling*; sampling yang mengacu pada *Purposive Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.

Berdasarkan keterangan di atas, dalam hal ini peneliti menetapkan informan tersebut yang terdiri dari informan kunci (key informan) dan informan tambahan. Yang merupakan informan kunci yaitu Kepala Desa, kaur pembangunan, sedangkan informan tambahan adalah masyarakat.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data yang akan dikumpulkan ada dua jenis yaitu:

1. Data Primer, data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau informan lapangan yang dilakukan melalui wawancara .

2. Data Sekunder, data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan-bahan kepustakaan baik berupa esip, laporan maupun dokumen yang berkaitan dengan subjek penelitian.

Untuk mendapatkan data yang

diperlukan dalam penelitian akan dipergunakan teknik pengumpulan data yaitu :

- Wawancara

Yaitu bentuk komunikasi secara lisan yang

berhadapan langsung dengan informan untuk mencari dan mendapatkan informasi serta

data yang dibutuhkan, dalam hal ini digunakan wawancara terbuka,

artinya mempunyai kebebasan dalam menjawab pertanyaan and tidak terlibat dengan alternatif-alternatif jawaban. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data primer dari

variable yang akan diteliti dan berguna untuk melengkapi data sekunder.

Wawancara dilakukan terhadap seluruh komponen yang

telah ditetapkan sebagai informan dalam penelitian ini.

- Studi Kepustakaan

Yaitu teknik yang digunakan dalam rangka memperoleh bahan-bahan ataupun data

yang bersumber dari perpustakaan. Bahan ini meliputi : buku-buku literature

maupun dokumen-dokumen resmi seperti peraturan-

peraturan dan kebijakan serta hasil laporan dan bahan-bahan yang lain yang

berkaitan dengan penelitian.

- Observasi

Merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam mengamati dan mencatat segala sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Jadi observasi ini digunakan untuk mengamati proses partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkripsi wawancara men-*scanning* materi, mengetik data lapangan, atau memilah-milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.
- b. Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah membangun *general sense* atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan.
- c. Menganalisis lebih detail dengan meng-*coding* data. *Coding* merupakan proses mengelola materi/informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya. Langkah ini melibatkan beberapa tahap

mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan mensegmentasi kalimat-kalimat (atau paragraf-paragraf).

- d. Terapkan proses *coding* untuk mendeskripsikan *setting* orang-orang, kategori-kategori, dan tema-tema yang akan dianalisis. Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang-orang, lokasi-lokasi, atau peristiwa-peristiwa dalam setting tertentu.
- e. Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif.
- f. Langkah terakhir dalam analisis data adalah menginterpretasi atau memaknai data. Mengajukan pertanyaan seperti “Pelajaran apa yang bisa diambil dari semua ini?” akan membantu peneliti mengungkap esensi dari suatu gagasan.²⁷

²⁷Jhon W Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif Kuantitatif dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), edisi ketiga, Hal 276

Tabel 3.1 Teknik Analisis Data